

Pengaruh Masyarakat Terhadap Formulasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Di Era Demokrasi Digital

Hendri Suwarsono

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*Corresponding Author: hendrisuwarsono@ugj.ac.id

ABSTRAK: Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang partisipasi politik baru yang semakin luas terbuka melalui media sosial. Dalam ruang tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu memengaruhi arah kebijakan politik dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap formulasi kebijakan politik di Indonesia pada periode 2015 hingga 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menelaah literatur akademik, laporan media, serta data empiris terkait dinamika politik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berkontribusi signifikan dalam membentuk opini publik, menggeser agenda politik, dan memberi tekanan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis. Interaksi digital yang intens dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik demokrasi deliberatif. Namun demikian, ruang digital juga menyimpan tantangan serius berupa risiko polarisasi, echo chamber, manipulasi opini oleh buzzer, serta penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor politik non-formal dengan kekuatan kolektif dalam memengaruhi legitimasi kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan transparansi komunikasi pemerintah menjadi prasyarat penting untuk menjaga ruang demokrasi digital tetap sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Masyarakat, Kebijakan Politik, Demokrasi Digital, Partisipasi Politik, Media Sosial

Abstract: The advancement of digital technology has created a new and increasingly open space for political participation through social media. In this space, the public does not merely act as consumers of information but also as active agents capable of influencing the direction of domestic political policies. This study aims to analyze the extent of public influence on political policy formulation in Indonesia from 2015 to 2025. The research employs a qualitative narrative approach by examining academic literature, media reports, and empirical data related to digital political dynamics. The findings reveal that public engagement significantly contributes to shaping public opinion, shifting political agendas, and pressuring the government to be more responsive to strategic issues. Intense digital interactions enhance transparency, accountability, and deliberative democratic practices. However, the digital sphere also presents serious challenges, such as the risks of polarization, echo chambers, opinion manipulation by buzzers, and the spread of disinformation that can undermine democratic quality. This study asserts that society functions as a non-formal political actor with collective power to influence public policy legitimacy. Therefore, improving digital literacy and ensuring transparent government communication are essential prerequisites for maintaining a healthy, participatory, and sustainable digital democracy.

Keywords: Society, Political Policy, Digital Democracy, Political Participation, Social Media

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia mencapai hampir 75 % pada pertengahan 2025, dengan lebih dari 200 juta masyarakat aktif di media sosial—menjadikannya aktor penting dalam proses politik digital. Media sosial telah berubah dari alat komunikasi menjadi arena interaksi politik yang memungkinkan masyarakat memengaruhi formulasi kebijakan melalui kampanye daring, pembentukan opini publik, dan tekanan politik digital (Kusuma et al., 2024). Pengalaman di masa pandemi, seperti respons publik terhadap kebijakan penanganan COVID-19, menunjukkan bahwa masyarakat dapat mempercepat adopsi kebijakan pemerintah melalui sorotan isu medis dan sosial (Anjar et al., 2021).

Analisis wacana publik menyoroti bahwa media sosial memiliki fungsi ganda: memfasilitasi aspirasi politik dan menyebarkan disinformasi. Studi pada kebijakan ekonomi-politik mengindikasikan bahwa opini masyarakat berpotensi memengaruhi keputusan pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada fragmentasi dan ketidakstabilan naratif (Magriasti et al., 2023). Kasus lokal seperti komunikasi antara pemerintah kota dan publik melalui media sosial menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan, sekaligus menegaskan pentingnya kualitas literasi digital publik (Widya, 2023).

Peran masyarakat dalam formulasi kebijakan menandai pergeseran lintas institusional: dari dominasi elit politik ke interaksi politik berbasis publik digital. Pola seperti keterlibatan masyarakat dalam kasus penegakan hukum melalui platform daring mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mempercepat respon kebijakan, sekaligus membentuk citra dan legitimasi pemerintahan (Risnanda et al., 2023).

Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis proses masyarakat memengaruhi kebijakan politik dalam negeri. Fokus diarahkan pada mekanisme framing opini publik oleh masyarakat, respon institusional terhadap tekanan digital, dan implikasi terhadap partisipasi demokrasi. Pendekatan kualitatif naratif dipilih untuk mengeksplorasi cerita aktivisme digital—bagaimana kampanye dan tekanan masyarakat di media sosial menciptakan momentum kebijakan, serta bagaimana pemerintah menyesuaikan strategi komunikasi dan kebijakan.

Penelitian Anjar et al. (2021) menegaskan bahwa media sosial berkontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19. Akses cepat terhadap informasi dan tingginya keterlibatan masyarakat menciptakan tekanan sosial yang mempercepat adopsi kebijakan kesehatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat berfungsi bukan hanya sebagai konsumen informasi, melainkan juga aktor yang aktif dalam memengaruhi keputusan politik.

Studi Widya (2023) menyoroti konsep *open government* melalui media sosial, yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Interaksi publik di ruang digital berperan dalam membangun akuntabilitas, meskipun masih terkendala literasi digital. Riset ini memperkuat gagasan bahwa

kualitas keterlibatan publik menentukan efektivitas masyarakat dalam memengaruhi kebijakan.

Risnanda et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial memengaruhi opini publik terhadap hukum dan kebijakan. Ketika isu hukum dibahas secara luas oleh masyarakat, tingkat legitimasi suatu kebijakan meningkat atau menurun seiring dengan arus opini daring. Penelitian ini menegaskan peran masyarakat sebagai penjaga moral sekaligus pengkritik aktif dalam sistem demokrasi digital.

KERANGKA TEORI

A. Teori Ruang Publik Habermas

Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menjadi salah satu fondasi utama dalam memahami peran masyarakat di media sosial. Ruang publik dipahami sebagai arena diskursif di mana individu dapat berdiskusi secara rasional mengenai isu publik (Habermas, 1989). Dalam konteks digital, media sosial menghadirkan ruang publik baru yang memungkinkan interaksi lebih cepat, lebih luas, dan lebih inklusif. Penelitian Kusuma et al. (2024) menunjukkan bahwa ruang publik digital di Indonesia berkembang sebagai medium komunikasi politik dua arah, di mana masyarakat mampu mengkritisi kebijakan pemerintah sekaligus menawarkan solusi. Hal ini memperkuat relevansi teori ruang publik dalam mengkaji dinamika kebijakan di era media sosial.

B. Teori Demokrasi Digital

Teori demokrasi digital menjelaskan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai katalis dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Menurut Coleman dan Blumler (2009), demokrasi digital memperkuat legitimasi sistem politik melalui keterbukaan informasi, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara. Di Indonesia, studi Magriasti et al. (2023) menegaskan bahwa media sosial tidak hanya mempercepat arus informasi kebijakan, tetapi juga menciptakan polarisasi opini publik. Kondisi ini menunjukkan ambivalensi demokrasi digital: di satu sisi memperkuat partisipasi, namun di sisi lain berpotensi melemahkan konsensus politik. Dengan demikian, teori ini penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan sebagai motor partisipasi sekaligus pemicu konflik sosial.

C. Teori Partisipasi Politik Online

Partisipasi politik online menjadi kerangka yang menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu kebijakan publik melalui platform digital. Menurut Anjar et al. (2021), keterlibatan masyarakat di media sosial mencakup aktivitas diskusi, petisi digital, hingga kampanye daring yang berimplikasi langsung pada kebijakan pemerintah. Teori ini memandang masyarakat sebagai *political actors* yang memiliki kekuatan kolektif melalui interaksi digital. Studi Widya (2023) tentang praktik *open government* di media sosial memperkuat kerangka ini, dengan temuan bahwa

keterlibatan publik di ruang digital mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi naratif untuk memahami pengaruh masyarakat terhadap kebijakan politik dalam negeri. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna subjektif, dinamika sosial, serta interaksi politik yang terbentuk melalui media sosial. Strategi naratif berfungsi untuk menelusuri pengalaman, wacana, dan narasi yang dibangun masyarakat dalam menanggapi isu-isu kebijakan publik.

A. Desain Penelitian

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi narasi politik yang terbentuk di ruang digital, khususnya pada platform media sosial yang dominan digunakan di Indonesia seperti Twitter (X), Facebook, Instagram, dan TikTok. Penelitian berupaya menafsirkan bagaimana masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan menginternalisasi narasi yang kemudian memberi tekanan terhadap pembuat kebijakan.

B. Subjek dan Unit Analisis

Subjek penelitian terdiri dari akun-akun media sosial yang aktif berpartisipasi dalam diskursus kebijakan publik. Unit analisis meliputi unggahan, komentar, tagar, serta interaksi digital terkait isu kebijakan dalam negeri yang mencuat sepanjang periode 2020–2025. Seleksi unit analisis dilakukan berdasarkan popularitas isu, intensitas diskusi, serta keterkaitan dengan agenda kebijakan pemerintah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi digital (digital ethnography) dengan menelusuri aktivitas masyarakat dalam ruang diskusi daring. Dokumentasi dilakukan terhadap postingan, komentar, serta liputan media daring yang memuat respons masyarakat terhadap isu kebijakan tertentu. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan secara daring kepada sejumlah informan kunci, seperti akademisi, praktisi media, dan aktivis digital, untuk memperkuat interpretasi data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola narasi yang berkembang, makna simbolik yang terkandung, serta hubungan antara narasi masyarakat dengan respons pemerintah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, membandingkan data dari media sosial, wawancara, serta literatur akademik yang relevan.

E. Pertimbangan Etis

Penelitian memperhatikan etika penelitian digital dengan menjaga kerahasiaan identitas informan serta menyamarkan nama akun media sosial. Data yang diambil

dari ruang publik digital tetap diperlakukan secara hati-hati untuk mencegah pelanggaran privasi dan menjaga integritas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ruang digital berpengaruh signifikan terhadap dinamika kebijakan politik di Indonesia. Media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi arena politik baru tempat masyarakat memproduksi narasi, menyebarkan isu strategis, dan membangun opini publik. Narasi yang terbentuk di ruang digital seringkali lebih organik dan partisipatif dibandingkan media arus utama, sehingga mampu menciptakan tekanan publik yang memaksa pemerintah merespons isu tertentu (Amal et al., 2022). Fenomena ini memperlihatkan mekanisme *agenda-setting digital*, di mana isu yang awalnya berkembang di media sosial kemudian diangkat oleh media konvensional hingga menjadi perhatian aktor politik formal.

Temuan juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai *virtual constituency* atau konstituen maya. Melalui kampanye digital, petisi daring, serta penggunaan tagar masif, masyarakat berhasil menekan pemerintah untuk meninjau ulang, menunda, bahkan mengubah kebijakan tertentu. Contoh nyata adalah gelombang protes digital terhadap RUU KUHP, Omnibus Law, serta kebijakan harga BBM yang mendapat perhatian besar dari publik. Respons cepat pemerintah terhadap isu-isu tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan kini tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh stabilitas opini publik di ruang digital (Anjar et al., 2021).

Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya risiko serius dari keterlibatan masyarakat. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, serta praktik buzzer politik dapat menurunkan kualitas deliberasi publik dan memperlemah konsensus sosial. Ruang digital yang seharusnya menjadi arena demokratis justru rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis melalui manipulasi opini. Dengan demikian, meskipun masyarakat terbukti memiliki peran penting sebagai aktor politik non-formal dalam demokrasi digital Indonesia, kualitas pengaruh tersebut sangat bergantung pada literasi digital masyarakat, transparansi pemerintah, serta kemampuan sistem demokrasi dalam mengelola dinamika partisipasi daring.

A. Dinamika Narasi Politik di Ruang Digital

Narasi politik di media sosial terbentuk melalui interaksi warganet yang mengangkat isu-isu strategis. Narasi ini seringkali berbeda dengan framing yang dibentuk media arus utama karena bersifat lebih organik dan partisipatif. Masyarakat memiliki peran penting dalam memproduksi konten alternatif yang memperkaya diskursus publik. Hasil penelitian Susanto (2017) mengungkap bahwa interaksi horizontal antarwarganet mempercepat proses pembentukan opini kolektif yang berpotensi menggeser agenda politik formal. Narasi digital dapat memperkuat

legitimasi atau justru memperlemah otoritas pemerintah, tergantung pada arah dominasi sentimen publik.

Hubungan timbal balik antara masyarakat, media arus utama, dan pemerintah membentuk pola baru dalam proses politik. Isu yang semula berkembang di ruang digital seringkali diangkat oleh media konvensional, kemudian memaksa pemerintah merespons. Fenomena ini dikenal sebagai *agenda-setting digital*. Studi oleh Lim (2017) menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang politik yang memengaruhi praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pergeseran distribusi informasi.

Kebijakan politik dalam negeri semakin dipengaruhi oleh sentimen publik yang terbaca melalui interaksi digital. Analisis *big data* memungkinkan pengukuran cepat atas kecenderungan opini masyarakat. Sentimen negatif yang masif berpotensi mendorong revisi, penundaan, atau pembatalan kebijakan tertentu. Sebagai contoh, penolakan publik terhadap beberapa pasal kontroversial dalam RUU KUHP 2022 banyak dipengaruhi oleh gelombang kritik warganet (Wardoyo, 2024). Keterhubungan digital menciptakan “konstituen maya” yang menekan legitimasi kebijakan. Hal ini menandakan perubahan signifikan dalam pola legitimasi politik, dari dominasi elite menjadi keterhubungan digital.

B. Masyarakat sebagai Virtual Constituency

Masyarakat berkembang menjadi aktor politik yang berperan layaknya konstituen virtual. Mereka tidak memiliki keterikatan formal dengan partai politik, namun mampu menekan aktor negara melalui opini digital. Penelitian Miqdad (2024) mengungkap bahwa pemerintah sering menunda atau mengubah kebijakan setelah melihat masifnya reaksi masyarakat. Konsep *virtual constituency* menjelaskan bahwa legitimasi politik kini tidak hanya ditentukan oleh dukungan elektoral, tetapi juga oleh stabilitas sentimen digital yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan.

Gelombang penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan kuatnya pengaruh masyarakat. Pada 2019, gerakan #ReformasiDikorupsi di Twitter menandai lahirnya gerakan politik digital yang berhasil memobilisasi aksi mahasiswa di berbagai kota. Tahun 2020, kontroversi Omnibus Law menuai kritik besar dari masyarakat melalui kampanye hashtag #TolakOmnibusLaw yang akhirnya memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi UU Cipta Kerja. Respon serupa terlihat dalam isu kenaikan harga BBM (2022), di mana pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik setelah kritik masyarakat semakin tajam. Pada 2022 pula, protes digital terhadap RUU KUHP menunjukkan bahwa ruang virtual menjadi medium artikulasi politik yang signifikan.

Fenomena politik digital tidak hanya terjadi di Indonesia. Filipina memperlihatkan kasus ekstrem di mana masyarakat memiliki peran besar dalam mobilisasi politik, namun kemudian dimanfaatkan oleh industri disinformasi untuk kepentingan elektoral (Ong & Cabañes, 2019). India juga menunjukkan kekuatan

digital activism, terutama dalam protes terhadap Citizenship Amendment Act 2019, meski akhirnya memperkuat politik identitas berbasis agama (Chaudhuri, 2020). Korea Selatan memberi contoh berbeda melalui penggunaan big data dalam membaca opini publik digital untuk perumusan kebijakan, sehingga menempatkan masyarakat sebagai mitra partisipatif. Perbandingan ini menempatkan Indonesia dalam posisi antara, dengan partisipasi digital yang kuat namun masih rentan terhadap buzzer dan manipulasi informasi.

C. Polarisasi Politik dan Populisme Digital

Kekuatan masyarakat tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga memunculkan risiko polarisasi. Ruang digital menjadi rentan terhadap echo chamber, di mana masyarakat hanya terpapar informasi sejalan dengan preferensi politiknya. Kondisi ini memperkuat tribal nationalism sebagaimana diungkap Lim (2017) dalam studinya tentang algoritmik enclave. Populisme digital juga berkembang, di mana aktor politik memanfaatkan sentimen masyarakat untuk memperoleh dukungan instan. Keberadaan buzzer politik memperparah situasi dengan menyebarkan hoaks dan disinformasi untuk memanipulasi opini publik. Hal ini menurunkan kualitas deliberasi politik dan mengancam keberlanjutan demokrasi digital.

Fenomena buzzer politik menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi digital. Kehadiran akun bayaran yang sistematis menyebarkan narasi tertentu menimbulkan distorsi terhadap opini publik. Studi Miqdad (2024) menunjukkan bahwa buzzer di Indonesia beroperasi dalam ekosistem terorganisir yang melibatkan elite politik dan konsultan komunikasi. Hoaks dan disinformasi yang diproduksi tidak hanya mengaburkan kebenaran, tetapi juga menurunkan kualitas deliberasi publik (Fitria, 2023). Perilaku ini berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap media sosial sebagai ruang diskursus politik.

Tekanan masyarakat tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi-politik. Sentimen negatif terhadap kebijakan tertentu sering kali menimbulkan fluktuasi pasar, terutama dalam investasi berbasis persepsi. Studi Dewi (2017) menegaskan bahwa gelombang penolakan publik terhadap kebijakan ekonomi melalui media sosial berhubungan dengan ketidakstabilan pasar saham jangka pendek. Pemerintah pada akhirnya terdorong memperkuat strategi komunikasi ekonomi agar narasi digital tidak berkembang menjadi kepanikan kolektif. Kasus penolakan Omnibus Law memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat dipengaruhi langsung oleh opini masyarakat (Fanny & Suroyo, 2022).

D. Implikasi Akademis bagi Studi Politik Digital

Kajian politik digital mengalami pergeseran paradigma sejak munculnya dominasi media sosial dalam kehidupan politik (Silitonga, 2023). Politik tidak lagi semata-mata dianalisis dari aspek institusional atau elektoral, melainkan juga dari dinamika digital yang bersifat cepat, partisipatif, dan seringkali disruptif. Menurut

penelitian Juniartri et al., (2025), studi politik kini perlu memperhitungkan hubungan antara jaringan digital, opini publik, dan kebijakan negara. Indonesia menjadi laboratorium penting untuk studi politik digital karena tingkat penetrasi media sosial yang tinggi dan keterlibatan masyarakat yang intens dalam isu-isu politik domestik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap proses kebijakan politik dalam negeri. Media sosial menjadi kanal utama bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan dukungan yang secara langsung memengaruhi dinamika pengambilan keputusan. Partisipasi digital tidak hanya merepresentasikan opini publik, melainkan juga menciptakan tekanan politik yang memaksa aktor pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan. Pola komunikasi dua arah antara masyarakat dan pembuat kebijakan memperkuat praktik demokrasi deliberatif, sekaligus menandai transformasi ruang publik ke dalam ekosistem digital.

Data empiris menunjukkan bahwa intensitas diskusi, viralitas isu, serta legitimasi yang dibangun melalui interaksi daring mampu membentuk agenda politik nasional. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat berperan sebagai agen politik non-formal yang memengaruhi arah kebijakan, baik dalam konteks transparansi, akuntabilitas, maupun responsivitas pemerintah. Pengaruh ini semakin besar ketika isu politik bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, seperti regulasi ekonomi, kebijakan kesehatan, hingga tata kelola sumber daya alam.

B. Saran

Upaya memperkuat peran masyarakat dalam ruang demokrasi digital memerlukan pendekatan yang sistematis. Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan literasi digital agar partisipasi politik berlangsung sehat, rasional, dan berbasis data. Transparansi kebijakan publik melalui kanal digital resmi harus ditingkatkan guna mencegah distorsi narasi akibat misinformasi maupun disinformasi. Kolaborasi antara akademisi dan komunitas digital juga menjadi penting untuk menghadirkan kajian berbasis data yang dapat menyeimbangkan opini publik sehingga tidak didominasi oleh wacana emosional.

Etika bermedia sosial wajib dikuatkan sebagai landasan partisipasi agar ruang diskusi tetap konstruktif serta terhindar dari polarisasi ekstrem. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan infrastruktur digital yang merata sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan setara dalam menyuarakan aspirasi. Penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif lintas negara dianjurkan untuk memperkaya pemahaman mengenai peran masyarakat dalam memengaruhi kebijakan politik di berbagai sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Naryoso, A., & Nugroho, A. (2022). Penggunaan media sosial Twitter sebagai media presentasi diri pada preferensi politik. *Interaksi Online*, 11(1), 527–546. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/37336>
- Anjar, A., Susilawati, E., Toni, T., Siregar, Z. A., & Yanris, G. J. (2021). Kontribusi media sosial terhadap kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 168–174.
- Chaudhuri, S. (2020). Digital Activism and Protest Movements in India. *South Asian Journal of Political Studies*.
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy*. Cambridge University Press.
- Dewi, R. (2017). Studi kasus penolakan publik atas kebijakan publik. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165>
- Fanny, O., & Suroyo, H. (2022). Analysis of Social Media Users Sentiments Against Omnibus Law Based on Hashtags On Twitter. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 11(1), 197–206.
- Fitria, N. J. L. (2023). Pengaruh strategi buzzer dalam amplifikasi pesan kepada publik pada lingkungan demokrasi politik. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1). <https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8724>
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Juniartri, I., Saepudin, E. A., Al Nabillah, F., Rohmah, N. M., & Putri, D. M. (2025). Kepemimpinan Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2464–2470.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 23–32.
- Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*.
- Magriasti, L., Yulanda, A., & Yulhendri, Y. (2023). Pengaruh media sosial terhadap kebijakan ekonomi politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 79–86.
- Miqdad, M. (2024). Literature review: Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 689–698. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>
- Ong, J. C., & Cabañes, J. V. (2019). *Architects of Networked Disinformation: Digital Campaigns in the Philippines*.
- Risnanda, R., Setiyowati, D. N., Kusuma, F. A., Manurung, D. R., & Sulaksono, T. (2025). Peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik terhadap hukum: Studi kasus pengeroyokan oknum BEM di FKIP. *Universitas Lampung, Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.62379/p0fmfg95>
- Silitonga, N. (2023). Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Presiden. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(2).

- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379–398. <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Wardoyo, C. S. (2024). Implikasi politik demokrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia: Studi kasus pengesahan RUU KUHP dan reaksi publik. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 447–458. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.625>
- Widya, A. R. (2023). Meningkatkan keterlibatan publik secara online di era open government. *IPTEKKOM*. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.2.2021.185-198>